

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMALSUAN SURAT DALAM DOKUMEN KONTRAK**

OLEH :

CAHYADI

NIM : 91217021



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMALSUAN SURAT DALAM DOKUMEN KONTRAK**

OLEH :

Cahyadi

NIM : 91217021

**Diajukan Sebagai Salah Satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHYADI
NIM : 91217021
BKU : Hukum Pidana
Judul Tesis : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PEMALSUAN SURAT DALAM
DOKUMEN KONTRAK

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar karya tulis saya, semua kutipan , saduran, dan lain-lain menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya
2. Apabila dikemudian hari ada klaim dari orang lain bahwa tulisan saya ini karyanya , maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya baik secara ilmiah maupun secara hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2019
Yang membuat pernyataan,

CAHYADI

JUDUL : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PEMALSUAN SURAT DALAM
DOKUMEN KONTRAK

NAMA : CAHYADI
NIM : 91217021
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.

Sekretaris : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. M.Hum.

Anggota : 1. Dr.H. Ruben Achmad, SH., MH
2. Dr. Erli Salia, SH., MH
3. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

2. Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana UMP

Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.



Tanggal Lulus Ujian : 5 Maret 2019

MOTTO:

Sesungguhnya Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil QS: An Nisaa (4): 58

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

Ayahanda dan Ibunda serta mertuaku yang saya hormati

Keluargaku tercinta

Saudara-saudaraku tersayang

Sahabat-sahabat baikku

Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan dan rahmat dan karuniaNya juga. Tesis ini dapat diselesaikan dengan dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yakni: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT DALAM DOKUMEN KONTRAK.**

Dalam penulisan ini penulis menyadari berbagai kekurangan di dalamnya oleh sebab itu berbagai masukan dan kritik yang disampaikan mudah-mudahan menjadi penyempurna dari tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr.Saipuddin Zahri , SH, MH. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum., selaku pembimbing II
6. Semua Dosen Pengajar dan Staf Administrasi di lingkungan Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Rekan-rekan mahasiswa pada Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dorongan semangat dan bantuan kepada penulis, semoga budi baik yang penulis terima, mendapat imbalan pahala dari Allah SWT...amin.

Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Maret 2019

Penulis



(Cahyadi)

ABSTRAK

Terkait dengan seringkalinya terjadi kontrak bermasalah, maka penting untuk dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum. Praktik hukum bisnis sering dijumpai terjadi masalah, salah satu masalah tersebut adalah pemalsuan surat dokumen kontrak. Kejahatan pemalsuan surat dokumen kontrak ini berimplikasi sangat besar bagi pihak korban yang mengalami kerugian materiil maupun non materiil. Dalam pembahasan tesis ini, kejahatan pemalsuan surat adalah pemalsuan Kuasa Direktur sebagai kelengkapan pembuat rekening tabungan berdampak pada transaksi dialihkan ke rekening pelaku pemalsuan itu sendiri. Tindak pidana pemalsuan surat tergolong sebagai perbuatan penipuan karena isi dalam dokumen kontrak yang dipalsukan yang marak dilakukan di masyarakat dibantu dengan kemajuan teknologi untuk mempermudah tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka **permasalahannya** adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak 2. Apa akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak. **Metode Penelitian.** Setiap penulisan ilmiah haruslah berdasarkan fakta-fakta yang obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis normatif dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk fakta tersebut. Penelitian ini termasuk **penelitian hukum normatif** yang hanya menggunakan data sekunder. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan penelitiannya adalah sebagaiberikut: 1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak yang dilakukan oleh penerima kuasa dari Direksi telah memenuhi pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi dianggap cakap dalam membuat Surat Kuasa Dokumen Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd dan sudah mampu keadaan jiwa sehingga asas legalitas terpenuhi. 2. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan dokumen kontrak berdampak pada penegakan hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Namun implementasinya harus dilakukan berdasarkan asas *ultimum remedium* yang menempatkan penerapan ancaman hukum penjara 6 (enam) tahun sebagai hal upaya terakhir setelah tindakan administratif berupa tindak pemutusan hubungan kerja karena tindakan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan tidak memberikan pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bila tidak diindahkan kemudian dilakukan upaya gugatan perdata ke Pengadilan karena pelaku pemalsu dokumen kontrak memasukkan seluruh hasil kontrak ke rekening pribadi maka dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pemalsuan surat, Dokumen kontrak

ABSTRACT

Related to the frequent occurrence of problem contracts, it is important to understand that almost all business activities are legal actions. Business law practices often encounter problems, one of which is the forgery of contract documents. The crime of falsifying this contract document has enormous implications for the victims who experienced material and non-material losses. In the discussion of this thesis, the fraudulent crime of the letter is a forgery of the Director's Authority as the completeness of the maker of the savings account which has an impact on the transaction being transferred to the account of the counterfeiters themselves. The crime of forgery of letters is classified as a fraud because the contents of a falsified contract document that is rampant in the community are aided by technological advances to facilitate the criminal act of falsifying the letter. Based on the background of the above problems, the problems are as follows: 1. How is criminal responsibility against forgery of letters in contract documents 2. What is the legal consequence of implementing criminal liability against forgery of letters in contract documents. Research Methods, Every scientific writing must be based on objective facts so that the truth can be accounted for both normatively juridically in this case an effort is needed for this fact. This study includes normative legal research that only uses secondary data. Based on the discussions that have been done before, the research conclusions are as follows: 1. The criminal liability for criminal acts of forgery of contract documents carried out by the power of attorney from the Board of Directors has fulfilled criminal liability because they have been considered competent in making the Power of Attorney for Contract Documents as stipulated in Article 1320 KUHPerd and already capable of mental state so that the principle of legality is fulfilled. 2. As a result of criminal law falsifying contract documents has an impact on law enforcement to obtain legal certainty. However, the implementation must be based on the principle of ultimum remedium which places the application of the legal threat of 6 (six) years imprisonment as a last resort after administrative actions in the form of termination of employment due to gross violations stipulated in Article 158 paragraph (1) letter a of Law No. 13 of 2003 by not giving severance pay as stipulated in Article 156 of Act No. 13 of 2003, if it is not heeded then an attempt is made to file a civil claim with the Court because the perpetrator of the contract document includes all the results of the contract into a personal account so that it can be considered as violating the law as stipulated in Article 1365 of the Civil Code

Keywords: Criminal Liability, Forgery of letters, Contract Documents

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Cover	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstract	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsional.....	9
1. Teori Pidana.....	9
2. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	22
Kerangka Konsepsional.....	27
G. Metode Penelitian.....	28

1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	33
B. Jenis Tindak Pidana.....	37
C. Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan.....	40
D. Pertanggungjawaban Pidana	54
E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	61
F. Perseroan Terbatas	74
1. Pengertian Perseroan Terbatas	74
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	76
3. Kedudukan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum....	77
4. Organ Perseroan Terbatas	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak.....	96
2. Akibat hukum pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat dalam dokumen kontrak	114
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	126
2. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A. Zainal, *et.al. Hukum Pidana* Makasar: Taufik, 1993
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2010
- _____, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti; 2004
- Agus Budiarto, , *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Anwar, H.A.K. Moch *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1980
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Kontrak Dagang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, Arief, *Kapita Selekti Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*,(Jakarta: Prenada, 2013
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Elfrida Gultom, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis Fakultas Hukum*, Jakarta: Universitas Mpu Tantular, 2007
- Frans Satrio Wicaksono, , *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia, 2009
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: RajaGrafindo 2003
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Muhammad Syarifudiin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Dogmatik dan Praktik Hukum (Studi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1998
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengungat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Rafika Aditama, 2004
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap Pasal demi pasal*, Bogor : Poliea, 1976

- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana.*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- R. Ali Ridho, *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2004
- Samosir, Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia 1991
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Babinkum TNI, 2012
- Suryadiningrat, *Azas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1985
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* Bandung: Alumni, 1977
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Paper dan karya Ilmiah

- Jimly Asshidiqie, paper , *Penegakan Hukum*, Jakarta, 2009
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Jakarta: Universitas Indonesia, 1997

Hukum dan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Rancangan KUHP Tahun 2010

Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Cirebon
Nomor 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972

Internet

<http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin>, Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.